

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mencapai tujuan bernegara, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak serta kebutuhan dasar warganya dengan menyediakan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah akan hal tersebut tentunya menuntut adanya anggaran yang besar dalam menjalankan roda pemerintahan. Tuntutan tersebut membuat pemerintah bersikeras dalam menggali sumber pendanaan untuk digunakan dalam membiayai setiap kegiatan pemerintahan yang semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan pendapatan di setiap tahun yang diwujudkan dengan penganggaran pendapatan melalui penetapan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan mendanai kebutuhan masyarakat. Pendapatan negara ini nantinya akan diarahkan dan digunakan untuk menunjang pelaksanaan pelayanan publik serta mewujudkan pembangunan nasional. Dari paparan diatas tercermin bahwa pendapatan negara merupakan hal yang ikhwal dalam menjalankan pemerintahan dalam suatu negara.

Pendapatan negara yang merupakan bagian dari APBN tentu masuk ke dalam lingkup keuangan negara. Pendapatan yang memiliki peran penting dalam pemerintahan perlu dimanajemen dengan baik agar terwujud tujuan yang ingin dicapai. Undang-undang keuangan negara mewajibkan pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, pemerintah sebagai organisasi sektor publik memiliki wewenang dan tanggung jawab salah satunya ialah menyediakan laporan keuangan yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu diperjelas dalam paket undang-undang keuangan negara yang menyebutkan bahwa semua entitas pemerintah yang melaksanakan fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dalam pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kewenangannya dalam mengelola keuangan negara.

Dalam kaitannya dengan penyusunan dan pelaporan keuangan, unit kerja pemerintah wajib melaporkan setiap komponen laporan keuangan yang menjadi bagian dari tanggung jawabnya tak terkecuali atas pos pendapatan. Bagi entitas pemerintah yang memiliki anggaran pendapatan dalam APBN wajib melaporkan atas setiap pendapatan yang diterima pada tahun anggaran bersangkutan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap APBN yang dikelolanya. Penyusunan dan pelaporan keuangan tentunya tidak luput dari setiap proses akuntansi yang dilakukan dalam menghasilkan sebuah laporan keuangan. Proses akuntansi ini

penting dilaksanakan untuk memberikan informasi keuangan yang handal, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk keperluan manajemen organisasi. Hal ini berarti bahwa setiap unit pemerintahan wajib menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah salah satu unit pemerintahan dibawah naungan Kementerian Keuangan yang diamanati untuk memungut pendapatan perpajakan dalam rangka optimalisasi penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, DJBC membentuk beberapa unit instansi vertikal dibawahnya untuk turut membantu dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengumpul pendapatan perpajakan. Salah satu unit instansi vertikal tersebut adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai (KPPBC TMC) Kediri. Sebagai salah satu entitas pemerintah pusat yang melaksanakan fungsi APBN, KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri berkewajiban menjalankan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban atas amanat APBN yang berada dalam pengelolaannya.

Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan pada entitas pemerintah harus berpedoman pada standar akuntansi yang telah ditetapkan. Hal tersebut senada dengan Pasal 32 ayat (1) UU 17/2003 yang menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ini sangat diperlukan dan menjadi salah satu

aspek penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintahan. Menanggapi urgensi tersebut, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2015 yang dinyatakan pada Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Terbitnya peraturan tersebut merupakan bentuk perwujudan transformasi akuntansi yang sebelumnya berbasis kas beralih ke akuntansi yang berbasis akrual dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah. Pemerintah meyakini bahwa diterapkannya akuntansi berbasis akrual ini akan jauh lebih baik memberikan informasi posisi keuangan yang lebih akuntabel, andal dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas.

Diimplementasikannya SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahan mengakibatkan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas diakui dan disajikan dalam laporan finansial (Laporan Operasional) secara berbasis akrual, sedangkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui dan disajikan dalam laporan pelaksanaan anggaran (Laporan Realisasi Anggaran) berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Adanya perbedaan basis akuntansi yang digunakan ini tentunya berpengaruh pada komponen-komponen laporan keuangan salah satunya komponen/pos pendapatan. Dalam hal ini, pos pendapatan dalam entitas pemerintah wajib dilaksanakan dalam dua basis akuntansi yakni menggunakan basis kas untuk jenis pendapatan-LRA dan basis akrual kas untuk jenis pendapatan-LO. Timbulnya dua jenis pendapatan akibat penerapan SAP basis akrual tersebut membuat adanya perbedaan perlakuan

akuntansi atas keduanya. Perbedaan perlakuan akuntansi tersebut terjadi pada proses pengakuan, pengukuran, pencatatan serta penyajian dan pendapatan.

Pada lingkup pemerintah pusat, definisi pendapatan negara dirumuskan dalam UU No. 17 Tahun 2003 sebagai hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan negara terbagi menjadi tiga jenis berdasarkan sumbernya yaitu pendapatan perpajakan, pendapatan negara bukan pajak, dan pendapatan hibah. Sumber penerimaan perpajakan sendiri diklasifikasikan menjadi tujuh kelompok pendapatan, salah satunya ialah pendapatan cukai dan pajak internasional yaitu bea masuk dan bea keluar. Pendapatan negara tersebut tentunya harus dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban APBN sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan di lingkungan pemerintahan.

Dalam pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan, seluruh instansi pemerintah wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah peraturan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Tidak hanya itu, laporan keuangan yang disajikan juga harus disusun dengan berpedoman pada kebijakan akuntansi yang diterapkan dan berlaku di lingkungan pemerintah pusat. Peraturan perundang-undangan tersebut harus dipatuhi dan dipedomani dalam menjalankan setiap proses akuntansi kaitannya dengan penyusunan laporan keuangan. Proses akuntansi tersebut tak terkecuali pada komponen pendapatan negara. Hal ini menjadi penting karena pendapatan negara memegang peranan tinggi dalam menjalankan

roda pemerintahan. Sehingga sangat diperlukan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara dalam hal pendapatan agar dapat terwujud pelaksanaan APBN yang akuntabel dan berkualitas.

KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri merupakan instansi dibawah DJBC yang mempunyai tugas dalam memungut pendapatan perpajakan sektor kepabeanan dan cukai di lingkungan pemerintah pusat. Sebagai bagian dari entitas pemerintah pusat yang turut dalam pelaksanaan APBN, KPPBC wajib menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban atas keuangan negara yang berada dalam kewenangannya termasuk pelaksanaan akuntansi terhadap pendapatan yang diterimanya. Satuan kerja tersebut merupakan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang salah satunya memiliki tanggung jawab dalam dalam proses pengakuan, pencatatan, pengukuran, penyajian dan pelaporan keuangan terkait penerimaan pendapatan perpajakan bea dan cukai pada satuan kerja tersebut. Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan pendapatan ini menjadi salah satu langkah penting dalam implementasi reformasi keuangan negara untuk turut mengawal dan mengawasi jalannya APBN dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan atas perlakuan akuntansi pendapatan yang telah dilakukan oleh unit akuntansi KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri. Menanggapi urgensi atas pelaksanaan akuntansi terhadap pendapatan, penulis juga memiliki ketertarikan untuk melakukan peninjauan atas kesesuaian perlakuan akuntansi pendapatan yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai

Kediri dengan SAP, kebijakan akuntansi pemerintah pusat, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, penulis membatasi ruang lingkup penulisan terkait akuntansi pendapatan pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri yakni dengan mengambil laporan keuangan tahun anggaran 2020. Pembahasan mengenai penerapan akuntansi pendapatan tersebut dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini dengan judul “PENERAPAN ATAS PERLAKUAN AKUNTANSI PENDAPATAN PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TMC KEDIRI”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan pada bagian latar belakang, maka penulis mengambil rumusan masalah pada Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan atas perlakuan akuntansi terhadap pendapatan yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri tahun anggaran 2020?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan atas perlakuan akuntansi pendapatan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kebijakan akuntansi pemerintah pusat, dan peraturan perundang-undangan pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri tahun anggaran 2020?
3. Apa saja kendala dan hambatan dalam pelaksanaan akuntansi terhadap pendapatan pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri tahun anggaran 2020?

1.3 Tujuan Penulisan

Dari uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan atas perlakuan akuntansi terhadap pendapatan yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri tahun anggaran 2020.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan atas perlakuan akuntansi pendapatan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kebijakan akuntansi pemerintah pusat, dan peraturan perundang-undangan pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri tahun anggaran 2020.
3. Untuk mengetahui kendala dan hambatan dalam pelaksanaan akuntansi terhadap pendapatan pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri tahun anggaran 2020.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Untuk membatasi pembahasan pada karya tulis ini agar tidak melebar ke beberapa hal yang terlalu luas, maka penulis menetapkan ruang lingkup penulisan. Penulisan karya tulis ini berfokus pada pembahasan mengenai perlakuan akuntansi terhadap pendapatan perpajakan bea dan cukai yang diterima oleh satker KPPBC Kediri. Pembahasan tersebut meliputi praktik akuntansi pendapatan yang terdiri dari definisi dan klasifikasi pendapatan; pengakuan, pengukuran dan pencatatan pendapatan; serta penyajian dan pengungkapan

pendapatan dalam laporan keuangan. Selain itu, karya tulis ini juga membahas mengenai kesesuaian penerapan atas perlakuan akuntansi pendapatan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tinjauan tersebut dilakukan dengan membandingkan perlakuan akuntansi pada satker tersebut dengan SAP dan kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Pembahasan tentang penerapan akuntansi pendapatan tersebut mengambil objek hanya pada laporan keuangan KPPBC Kediri tahun anggaran 2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penulisan yang telah dipaparkan, maka dapat dijelaskan manfaat yang diharapkan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi pemerintahan, khususnya yang terkait dengan topik akuntansi pendapatan pada instansi pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya serta menambah sumber informasi serta pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintahan di lapangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pembacanya untuk memperoleh sudut pandang baru mengenai akuntansi pemerintahan dari sisi praktis.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan mengenai penerapan akuntansi pendapatan pada entitas pemerintah, khususnya penerapan atas perlakuan akuntansi pendapatan pada KPPBC Kediri.
- b. Bagi peneliti yang lain, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan gambaran awal dalam melakukan penelitian mengenai praktik/penerapan akuntansi pemerintah dengan objek dan/atau tema serupa.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terkait akuntansi pemerintahan pada instansi pemerintah, khususnya teori dan praktik akuntansi pendapatan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai mengenai penerapan akuntansi pendapatan pada KPPBC Kediri tahun anggaran 2020.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini terdiri dari empat bab yang pada tiap-tiap babnya berisi subbab-subbab dengan urutan penyusunan pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I dalam karya tulis ini berisikan pendahuluan sebelum ke pembahasan topik yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang

lingkup penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II dalam KTTA ini berisi uraian tentang teori-teori perlakuan akuntansi pendapatan yang dijadikan sebagai landasan dan dasar pedoman untuk melakukan pembahasan topik pada karya tulis ini. Teori yang dipaparkan adalah teori yang berkenaan dengan perlakuan akuntansi pendapatan pada instansi pemerintah pusat yang meliputi teori pengertian pendapatan, klasifikasi pendapatan, pengakuan pendapatan, pengukuran pendapatan, dan penyajian pendapatan serta pengungkapan pendapatan yang ada dalam laporan keuangan. Dalam hal ini, penulis berpedomankan pada Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, peraturan perundang-undangan lain, buku, jurnal, artikel, dan literatur tertulis lainnya yang berkaitan dengan teori dan praktik perlakuan akuntansi pendapatan pada instansi pemerintahan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab III dalam karya tulis ini menguraikan tentang metode pengumpulan data yang digunakan, gambaran umum mengenai profil KPPBC Kediri yang menjadi objek penelitian, serta pembahasan inti mengenai peninjauan kesesuaian atas penerapan perlakuan akuntansi pendapatan pada satker tersebut dengan standar akuntansi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada bagian gambaran umum tentang objek penelitian, penulis memaparkan profil umum KPPBC Kediri. Bagian itu meliputi profil dan sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta uraian

singkat mengenai unit penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pada KPPBC Kediri.

Pada bagian pembahasan, penulis menyajikan data berkenaan dengan penerapan atas perlakuan akuntansi pendapatan yang dilakukan oleh KPPBC Kediri pada laporan keuangannya. Pembahasan tersebut meliputi kebijakan akuntansi, definisi dan klasifikasi pendapatan, pengakuan dan pencatatan pendapatan, pengukuran pendapatan, penyajian dan pengungkapan pendapatan, serta penjelasan singkat atas pos pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Dari pemaparan data dan fakta penerapan akuntansi pendapatan tersebut, penulis melakukan peninjauan atas penerapan perlakuan akuntansi pendapatan pada KPPBC Kediri apakah telah memenuhi standar akuntansi yang diterapkan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih dari itu, penulis juga membahas secara singkat mengenai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan akuntansi pendapatan yang dilakukan oleh KPPBC Kediri.

BAB IV SIMPULAN

Bab IV dalam karya tulis ini menguraikan simpulan atas penjelasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Simpulan yang diambil ini nantinya menunjukkan hasil penelitian secara keseluruhan yang disajikan dengan ringkas.